



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 19 November 2024

Halaman: 1



# Putus Asa Buang Sisa

## ■ Problem Sampah di Kota Yogya Butuh Penanganan Segera

**YOGYA, TRIBUN** - Kesulitan dalam membuang sampah masih juga dirasakan warga masyarakat Kota Yogya, hingga menjelang penghujung tahun 2024 ini. Bahkan, sebatas membuang residu yang tidak bisa diolah pun membutuhkan perjuangan tersendiri. Sulastri, warga Kota Yogya, mengaku masih merasakan sulitnya buang sam-

pah. Padahal, dirinya sudah konsisten mengikuti anjuran pemerintah untuk memilah limbah organik dan anorganik sejak dari hulu, atau level rumah tangga, bahkan sampai upaya pengolahan dengan beragam metode. Meski demikian, tidak semua jenis



*Saya kecewa melihat situasi ini. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan sampah menumpuk seperti ini.*

● ke halaman 11

## Putus Asa

● Sambungan Hal 1

limbah anorganik bisa diboyongnya ke bank sampah. Sampah-sampah kertas atau plastik yang nila keekonomiannya cenderung rendah harus dibawanya pulang kembali. "Mau tidak mau saya harus membuang, kan. Tapi, mau membuang saja repot. Harus pagi-pagi jalan ke depo, karena ada pembatasan. Beberapa kali sampai sana tutup, atau penuh, kan *enggak* mungkin saya lempar begitu saja," cetusnya, Senin (18/11).

Alhasil, beberapa kali sudut ruangnya penuh dengan residu yang sebetulnya sudah dalam kondisi bersih karena proses pemilahan. Saking putus asanya cari cara buang sisa sampah, ia sampai harus sedikit 'curang' dengan menitipkan residu ke anaknya yang tinggal di hilir kota.

"Sudah mentok, sampah *enggak* pernah diambil lagi, depo penuh terus. Ya sudah, saya titipkan ke anak. Dia tinggal di luar kota, masih lancar pembuangan sampahnya. Di perumahannya itu sampah diambil seminggu dua kali. Jadi, sehari sebelum jadwal pengangkutan, saya suruh anak mampir ke rumah, mengambil residu yang terkumpul," ungkapnya.

Warga Kota Yogya lainnya, Rianti, mengatakan, tidak sedikit masyarakat yang masih abai terhadap upaya pengelolaan limbah dan dengan entengnya membuang sampah di tempat-tempat terlarang, seperti trotoar, atau tanah kosong. "Pusing juga, lihat depo-depo penuh, di jalanan banyak pembuangan liar. Maksudnya, ayolah, kita sama-sama peduli, begitu loh," cetusnya.

Rianti pun mengaku sudah sangat jengah dengan kondisi ini. Ia kadang merasa, ketekunannya memilah limbah setiap hari belum bisa membantu banyak. Karenanya, ia berharap,

Pemkot Yogya bersungguh-sungguh menyelesaikan problem persampahan yang berkepanjangan ini.

"Jangan sampai warga yang sudah disiplin itu capek, karena kondisinya tetap begini-begitu saja. Harus ada upaya konkret dari pemerintah," tegasnya.

### Menteri sidak

Permasalahan sampah di DI Yogyakarta, terutama di Kota Yogya, kian menjadi-jadi setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, ditutup pada kisaran April silam. Tumpukan sampah semakin sering ditemukan di depo-depo pembuangan maupun di sudut-sudut kota.

Masalah sampah ini juga mendapat perhatian khusus dari Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, ia melakukan inspeksi mendadak ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan, Bantul, Depo Mandala Krida, Kota Yogya, serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Minggir, Sleman, Senin (18/11).

Di Depo Mandala Krida, ia langsung disuguhi pemandangan tidak sedap, di mana kondisi tempat pembuangan sementara tampak dipenuhi gunung limbah. Terang saja, kondisi tersebut membuat geram eks Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu, ia menilai, situasi ini mencerminkan ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kota Pelajar.

"Ini mencemari lingkungan. Dengan kapasitas 300 ton per hari, sampah dari sini ke mana dibuangnya? Harus ada yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Jika terbukti ada pelanggaran, saya akan menyeret pihak yang bersalah ke jalur hukum sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008," tegasnya.

Hanif juga menyarankan pemerintah daerah di tingkat kota/kabupaten maupun

provinsi harus segera mencari jalan keluar yang konkret untuk menangani problem persampahan. "Saya kecewa melihat situasi ini. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan sampah menumpuk seperti ini. Saya akan memanggil Pemkot Yogya untuk meminta penjelasan detail terkait pengelolaan sampah ini. Dengan anggaran cuma Rp100 miliar, jelas tidak cukup untuk menangani sampah di kota ini. Jika pengelolaan di hulunya tidak serius, sampah pasti akan terus menumpuk di TPA," ujarnya.

Ia berjanji akan menurunkan tim penyidik dan pengawas lingkungan hidup untuk menyelidiki masalah sampah tersebut. Selain itu, ia memastikan langkah penegakan hukum bakal diambil terhadap pihak yang terbukti lalai. "Saya tidak akan mundur dari penegakan hukum. Ini harus ada terdaksananya agar masyarakat mendapat rasa keadilan," tandasnya.

Meski tak merinci, Hanif juga menyebut bahwa ada tiga TPA yang kini sedang dalam penyidikan dan akan segera ditindaklanjuti jika ditemukan bukti pelanggaran. Satu TPA di antaranya milik pemerintah kabupaten dan dua milik pemerintah provinsi.

### Kelola hulu

Hanif juga mendorong kepada pemerintah daerah agar mampu mengaktifkan serta mengefisienkan pelaksanaan pengolahan dan pemilahan sampah di hulu dengan membangun bank sampah, lengkap dengan penyuluh lingkungan hidupnya. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sampah tidak terlalu berat di hilir. Ia juga meminta dinas terkait di tiap daerah untuk mengencangkan pembangunan bank-bank sampah dan penyuluhan terkait pilah dan pilih sampah.

Hanif juga menyarankan agar pemerintah setempat bisa belajar dari daerah lain

yang sudah sukses dalam pengelolaan sampah, seperti Surabaya dan Banyuwangi. "Jika pengelolaan di hulu dilaksanakan dengan baik, sampah tidak akan menumpuk di TPA. Penanganan harus dimulai dari sumbernya," katanya.

Sebagai langkah konkret, Hanif meminta seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera mencari solusi permasalahan sampah di Yogyakarta. "Saya minta direktur terkait segera menarikan solusi. Penegakan hukum tetap dilakukan, tetapi pendampingan teknis dan pendanaan juga harus dipikirkan," pungkaskannya.

Hanif menyampaikan bahwa penutupan sementara TPA Piyungan oleh Pemerintah DIY adalah untuk menata ulang TPA agar lebih ramah lingkungan. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut. "Pak Gubernur telah mengambil langkah kebijakan dengan menutup sementara TPA Piyungan untuk dilakukan penataan ulang," kata MenLH.

Di sisi lain, ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sleman yang dinilai serius dalam menangani sampah. Sebab, keberadaan TPST, selain untuk menangani persoalan sampah juga membawa dampak positif lain seperti peningkatan jumlah tenaga kerja dan pemanfaatan ekonomi.

"Di sini (TPST Minggir Sleman) hampir 8-9 truk sampah dalam sehari yang mampu dikelola. Sleman membangun (TPST) hampir di tiga lokasi (dari rencananya empat lokasi). Ini menyampaikannya bahwa begitu seriusnya Kabupaten Sleman dalam menangani pengelolaan sampahnya. Kita apresiasi, kita salut kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Semestinya ini dapat dicontoh oleh kabupaten yang lain," katanya. (aka/han/nel/trif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005